

2026 Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT. Bank Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia



**LEMBAR PERSETUJUAN RAKB
(RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026
PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH MITRA CAHAYA INDONESIA

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

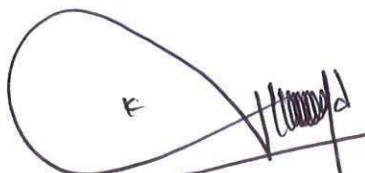
1. POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026 ini disusun dalam rangka menerapkan rencana program kerja Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Sleman, 08 Desember 2025

PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH MITRA CAHAYA INDONESIA

Disusun oleh

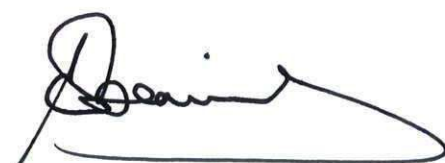

KHOLID, S. PD, M.M.
DIREKTUR UTAMA




MUSHONIFUL AGSUTIAN, S.E, M.M
DIREKTUR OPERASIONAL & KEPATUHAN


DEDE HARIS SUMARNO, SE, MM.
KOMISARIS UTAMA

Disetujui oleh,


PROF.DR.H. EDY SUANDI HAMID, M.EC.
KOMISARIS

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia merespon kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia Tahun 2026 sebagai pondasi dan landasan strategik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan Bank.

BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. BPRS sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) melalui dana yang yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia berkewajiban dalam membiayai debitur secara selektif dengan menghindarkan diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontra produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam keterkaitan positif ini (*positive linkage*), BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia menyadari pentingnya isu pengelolaan Keuangan Berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan) dan Profit (Ekonomi) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau ESG (*Environmental, Social and Governance*).

BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) agar dapat secara efektif mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 01 Januari 2026 - 31 Desember 2026 dan periode 5 (lima) tahun yaitu 01 Januari 2024 - 31 Desember 2028 dimana sesuai kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 milyar implementasi tahap awal RAKB dimulai pada tahun 2024.

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu POJK Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan/ atau Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

DAFTAR ISI

SAMPUL RENCANA KEBERLANJUTAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
 BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	 5
1.1. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	5
1.2. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.3. Program yang Akan Dilaksanakan Dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	6
1.4. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan	7
1.5. Seluruh Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	7
 BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	 9
2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan	9
2.2. Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	9
 BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	 10
3.1. Rencana Strategis Bank	10
3.2. Kapasitas Organisasi	10
3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	13
3.4. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal	14
3.5. Strategi Komunikasi	14
3.6. Sistem Monitoring	14
3.7. Kebijakan Pemerintah	14
3.8. Pendekatan Analisis Faktor Tertentu	14
 BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	 16
4.1. Pengembangan kapasitas intern LJK	16
4.2. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan	17
4.3. Program Efisiensi dan Pelestarian Lingkungan Alam	18

BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	20
5.1. Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi	20
5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	20
5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	21
5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Tercapai Tujuan yang Diinginkan	21
5.5. Penutup.....	23

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

1.1.1. Visi

Terwujudnya Bank Syariah yang unggul dan terpercaya dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

1.1.2. Misi

Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan :

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan Masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup
4. Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin

1.2. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai, tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu : Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu menjalankan organisasi yang berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan hidup.

1.3. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.3.1. Rencana Satu Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian	Sumber Daya yang dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	01 Januari sd 28 Februari 2026	Sosialisasi/refreshment konsep dasar Keuangan Berkelanjutan dan penyampaian program RAKB perusahaan pada Tahun 2026	Merefresh kembali akan kesadaran akan keuangan berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam program yang telah disusun oleh perusahaan.	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.	SDM	Satuan Kerja Kepatuhan
2	01 Januari sd 31 Juli 2026	Penanaman 400 Bibit Pohon (program yang tertunda di tahun 2025)	meningkatkan kepedulian pemulihan sumber daya alam melalui penanaman 400 bibit pohon yang dapat menyerap polusi udara, dan menghasilkan oksigen yang menyegarkan udara sehingga sesuai untuk dimanfaatkan sebagai pohon penghijauan	Realisasi pelaksanaan program di Semester II Tahun 2026	Dana dan SDM	Divisi Corporate Secretary
3	01 Juli sd 31 Desember 2026	Pengadaan 10 unit Rumah Botol untuk Sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan BPRS	Mendukung pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah plastik di sekolah mitra	Serah terima 10 unit Rumah Botol (rumah penampungan botol plastik bekas) kepada 10 sekolah mitra BPRS	Dana dan SDM	Unit Kerja Funding
4	01 Januari sd 31 Desember 2026	Penghematan Biaya BBM Kendaraan	Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil pada kendaraan operasional dan kendaraan dinas serta menurunkan emisi karbon	Penghematan biaya BBM sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025.	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
5	01 Januari sd 31 Desember 2026	Efisiensi Penggunaan Listrik (program lanjutan dari tahun 2025)	Mengurangi penggunaan listrik dalam operasional perusahaan	Penghematan biaya listrik sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025.	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
6	01 Januari sd 31 Desember 2026	Mengurangi Penggunaan Kertas (program lanjutan dari tahun 2025)	Penghematan biaya serta mendukung program go green dengan pemanfaatan aplikasi sistem secara on line (<i>paperless</i>)	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
7	01 Januari sd 31 Desember 2026	Penggunaan wadah minuman yang dapat digunakan (program lanjutan dari tahun 2025)	Meminimalisir penggunaan tempat minum berbahan plastik	Mengurangi penggunaan air minum kemasan	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
8	01 Januari sd 31 Desember 2026	Peningkatan penyaluran pembiayaan pada sektor Pekerja Migran Indonesia	Mendukung peningkatan kapasitas ekonomi, mendukung SDGS (<i>Sustainable Development Goals</i>) 8 & 10, serta diversifikasi portofolio berkelanjutan BPRS	Pencapaian outstanding Pembiayaan PMI dengan target 30 Milyar pada Desember 2026	SDM	Divisi Bisnis

1.3.2. Rencana Lima Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Indikator Pencapaian
1	TAHUN 2024	Aktivitas Program RAKB yang telah disusun pada tahun 2024	Pencapaian Aktivitas Program RAKB yang telah disusun pada tahun 2024
2	TAHUN 2025	Aktivitas Program RAKB yang telah disusun pada tahun 2025	Pencapaian Aktivitas Program RAKB yang telah disusun pada tahun 2025
3	TAHUN 2026	1. Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan 2. Memiliki Produk Keuangan Berkelanjutan	1. Memiliki Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan yang update dengan penyempurnaan ketentuan 2. Telah dilakukan kajian terhadap produk pembayaran yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta produk bagi segmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai prinsip keuangan berkelanjutan.
4	TAHUN 2027	Pembelajaran kepada Debitur	Telah dilakukan edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan, dan pelaksanaan proyek dengan tema go green
5	TAHUN 2028	Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan	Jumlah pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.

1.4. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab aktivitas/program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi.

1.5 Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Satuan Kerja Kepatuhan , Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Divisi *Corporate Secretary* menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan divisi terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Divisi *Corporate Secretary* mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Satuan Kerja Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
4. Divisi Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan.

5. Divisi HR, GA dan Legal melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
6. Divisi HR GA dan Legal melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.
7. Divisi Bisnis menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya

BAB II

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan di BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I di Indonesia 2015 - 2019.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 - 2025.
- c. Peraturan OJK Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- d. Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Laporan RAKB ini disusun oleh internal BPRS yaitu Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Divisi *Corporate Secretary* yang didukung oleh Unit Kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan RAKB oleh Satuan Kerja Kepatuhan dibantu oleh Manajemen Risiko dan Divisi *Corporate Secretary*
2. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Divisi HR, GA dan Legal
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Divisi HR, GA dan Legal
4. Langkah strategis khususnya terkait penentuan prioritas program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek dan jangka panjang diarahkan oleh Direksi melalui persetujuan Dewan Komisaris.
5. Pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Divisi *Corporate Secretary*
6. Penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan oleh Divisi Teknologi Informasi
7. Divisi Bisnis menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

3.1. Rencana Strategis Bank

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan terus mengembangkan dan menyediakan produk- produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada dalam Jaringan Kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia dengan target pasar utama adalah pengusaha UMKM dan juga pembiayaan kepada pegawai perusahaan yang telah bekerjasama. BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia juga akan meningkatkan portolio pembiayaan untuk membantu pembiayaan UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan melaksanakan pelatihan- pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari.

Sesuai dengan visi BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia untuk terwujudnya bank syariah yang unggul dan terpercaya, BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan melakukan penetrasi pasar ke wilayah pemasaran baru di pasar-pasar yang berada dalam Jaringan Kantor BPRS.
2. Ikut serta dalam pemberian pembiayaan sindikasi bersama mitra BPRS lainnya
3. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah yang loyal
4. Pembuatan promosi audio maupun video melalui media sosial.

3.2. Kapasitas Organisasi

3.2.1. Kapasitas Organisasi

Untuk mencapai visi dan misi BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia perlu didukung oleh sumber daya yang handal dan secara struktur organisasi disesuaikan dengan arah kebijakan dan pengembangan bisnis.

Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	Dede Haris Sumarno, SE., M.M	Komisaris Utama
2	Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec	Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ahim Abdurahim SE.,M.Si.,AK.,SAS,CA,ACPA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Toto Suparwoto, S.Pd.	Dewan Pengawas Syariah

Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	Kholid, S.Pd. M,M	Direktur Utama
2	Mushoniful Agustian, S.E., M.M	Direktur Operasional & Kepatuhan

Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	Sesilia Lilies Andriani	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
2	Winasista Salarina	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT
3	Chandra Widya Mahardika	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
4	Nurten Novita Sari	Kepala Divisi Operasional
5	Teddy Sutrisna	Kepala Divisi HR GA dan Legal
6	Prabawa Rahmat Ismail	Kepala Divisi IT & MIS
7	Faradays Muhammad	Kepala Divisi Bisnis
8	Fitri Rini Farida	Kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i>

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Seiring persaingan yang semakin meningkat dan ketat maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten pada bidang masing- masing. Komposisi SDM di BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia juga memperhatikan kompetensi dan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Jumlah Komposisi Pegawai

Jumlah Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	6
3	Sarjana (S1)	32
4	Sarjana Muda / Diploma	3
5	SMA Atau Sederajat	10
6	SMP Sederajat	0
7	SD Sederajat	0
Total		51

Jumlah Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	35
2	Perempuan	16
Total		51

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan training- training untuk pegawai baik itu secara offline maupun online dengan pemateri internal maupun dari pihak eksternal BPRS dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia dan dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

3.3.1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Bank Kuartal III tahun 2025 dan selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai pada tabel di bawah ini.

A. Kinerja Keuangan

(Dalam jutaan rupiah)

No	Indikator	2025 (TW III)	2024	2023
1	Total Aset	Rp302.133	Rp301.519	Rp267.232
2	Modal Inti	Rp29.541	Rp29.977	Rp28.594
3	Total Pembiayaan	Rp231.042	Rp225.398	Rp193.553
4	Dana Pihak Ketiga	Rp170.041	Rp173.456	Rp157.632
5	Pendapatan Operasional	Rp21.861	Rp31.670	Rp30.900
6	Beban Operasional	Rp13.358	Rp16.653	Rp14.902
7	Laba Operasional	Rp1.446	Rp3.804	Rp2.450

B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2025 (TW III)	2024	2023
1	Rasio KPMM	21,93%	23,72%	23,72%
2	NPF Gross	7,09%	6,21%	6,67%
3	NPF Net	6,28%	4,71%	5,29%
4	ROA	0,85%	1,76%	1,28%
5	NIM	5,43%	6,73%	1,43%
6	Rasio BOPO	92,64%	87,16%	91,76%
7	FDR	135,87%	129,95%	73,25%

3.3.2. Kapasitas Teknis

Peningkatan kapasitas teknis teknologi Bank menjadi perhatian utama antara lain dengan penyediaan aplikasi/software berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan Keuangan Berkelanjutan di masa mendatang.

3.4 Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

Dalam program pengembangan kapasitas internal, BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan ketentuan regulasi.

3.5 Strategi Komunikasi

Secara internal BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan Perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan listrik, BBM, air dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.

Selanjutnya secara eksternal BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia memberikan edukasi kepada pihak debitur agar memiliki kepedulian dalam menjalankan usahanya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3.6 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat Divisi yang dilaksanakan oleh divisi masing-masing untuk membahas permasalahan bisnis dan operasional.

3.7 Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

3.8 Pendekatan Analisis Faktor Penentu

Adapun faktor dari penentu pembuatan RAKB ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity and Threats*) dalam menganalisa potensi yang dimiliki oleh BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia.

Kekuatan (*Strengths*)

- Memiliki ketersediaan layanan yang cepat
- Demografi karyawan yang didominasi oleh usia produktif sehingga memiliki semangat untuk memajukan Bank;
- Memiliki basis nasabah yang loyal dan sudah lama menjalin hubungan usaha dengan bank

Kelemahan (*Weakness*)

- Kualitas SDM yang perlu terus ditingkatkan Produk dan layanan masih terbatas;
- Sistem dan prosedur serta pedoman operasional masih dalam proses penyempurnaan;

Peluang (*Opportunities*)

- Sinergi dengan mitra strategis perusahaan
- Pertumbuhan UMKM yang baru di sekitar Jaringan Kantor BPRS
- Kebijakan pemerintah yang fokus pada tujuan *Sustainable Development Goals*;

Ancaman (*Threats*)

- Ketidakpedulian masyarakat yang masih kurang terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- Penggunaan kebutuhan dasar yang menggunakan bahan tidak ramah bagi kesehatan dan lingkungan;
- Ekosistem ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung bisnis keuangan yang berkelanjutan.

BAB IV
PRIORITAS DAN URAIAN
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

4.1. Pengembangan Kapasitas Intern LJK

a. Dasar Pemikiran

BPRS mengembangkan kapasitas SDM melalui sosialisasi-sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang Keuangan Berkelanjutan serta kesiapan untuk melaksanakan program perusahaan terkait keuangan berkelanjutan.

b. Kegiatan

No	Uraian Aktivitas	Periode	Sumber Daya yang dibutuhkan	Penanggung jawab
1	Sosialisasi/refreshment konsep dasar Keuangan Berkelanjutan dan penyampaian program RAKB perusahaan pada Tahun 2026	01 Januari sd 28 Februari 2026	SDM	Satuan Kerja Kepatuhan

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan tidak memerlukan dana perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya. serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh divisi terkait.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

4.2. Pengembangan Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan

a. Dasar Pemikiran

BPRS mengembangkan produk pembiayaan yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan, dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya. Program pembiayaan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan bagian dari upaya BPRS dalam memperluas akses keuangan inklusif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pengurangan tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja formal. Dengan demikian, program ini memberikan dampak sosial yang signifikan dan sejalan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan OJK, serta berkontribusi pada pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

b. Kegiatan

No	Uraian Aktivitas	Periode	Sumber Daya yang dibutuhkan	Penanggung jawab
1	Peningkatan penyaluran pembiayaan pada segmen Pekerja Migran Indonesia	01 Januari sd 31 Desember 2026	SDM	Divisi Bisnis

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan Dimana dibutuhkan SDM yang kompeten pada unit kerja pembiayaan khususnya Account Officer serta didukung oleh seluruh unit kerja dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan secara berkala dan terstruktur melalui monitoring bulanan terhadap realisasi penyaluran serta tingkat NPF oleh Divisi penanggung jawab terkait .

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, risiko kegagalan penempatan calon PMI, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya

4.3. Program Efisiensi dan Pelestarian Lingkungan Alam

a. Dasar Pemikiran

Pelaksanaan Program Efisiensi dan Pelestarian Lingkungan Alam merupakan wujud komitmen BPRS untuk mengintegrasikan prinsip environmental (lingkungan) ke dalam seluruh aktivitas operasional dan bisnisnya. Program ini dirancang guna mengurangi jejak karbon, menghemat sumber daya alam, serta memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional secara berkelanjutan, sehingga BPRS tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi OJK, tetapi juga memperkuat citra sebagai lembaga keuangan syariah yang bertanggung jawab, inklusif, dan peduli terhadap kelestarian alam bagi generasi mendatang..

b.

No	Uraian Aktivitas	Periode	Sumber Daya yang dibutuhkan	Penanggung jawab
1	Penanaman 400 Bibit Pohon Sengon (program yang tertunda di tahun 2025)	01 Januari sd 31 Juli 2026	Dana dan SDM	Divisi <i>Corporate Secretary</i>
2	Pengadaan 10 unit Rumah Botol untuk Sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan BPRS	01 Juli sd 31 Desember 2026	Dana dan SDM	Unit Kerja Funding
3	Penghematan Biaya BBM Kendaraan	01 Januari sd 31 Desember 2026	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
4	Efisiensi Penggunaan Listrik (program lanjutan dari tahun 2025)	01 Januari sd 31 Desember 2026	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
5	Mengurangi Penggunaan Kertas (program lanjutan dari tahun 2025)	01 Januari sd 31 Desember 2026	SDM	Divisi HR,GA dan Legal
6	Meminimalisir penggunaan tempat minum berbahan plastik (program lanjutan dari tahun 2025)	01 Januari sd 31 Desember 2026	SDM	Divisi HR,GA dan Legal

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang berasal dari dana Perusahaan untuk mendukung program tersebut. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh divisi terkait.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

BAB V
TINDAK LANJUT
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di atas berada di bawah Direktur Operasional dan Kepatuhan dan dievaluasi pada setiap periode akhir kegiatan. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara spesifik peran Direktur Operasional dan Kepatuhan dan masing-masing kepala divisi terkait dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dalam memantau pelaksanaan Keuangan berkelanjutan. Dari sisi Manajemen Risiko akan dilaksanakan monitoring risiko pembiayaan dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan Manajemen Risiko.

5.2. Penentuan waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektifitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:

**Penentuan Waktu Untuk Mengukur
Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Bulanan	Divisi penanggung jawab Penyusun RAKB bekerjasama dengan Divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	01 Januari sampai 31 Desember 2026	Divisi penanggung jawab Penyusun RAKB bekerjasama dengan Divisi terkait
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir Bulan April tahun 2027	Divisi penanggung jawab Penyusun RAKB bekerjasama dengan Divisi terkait

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat dijalankan sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka Bank akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
- b. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya (jika ada).

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi sebagai berikut:

1. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan nasabah.
 - Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum dimulainya implementasi. Program prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 - Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.

3. Pengembangan dan penyesuaian Produk dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.

- Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor UMKM dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan pick up dana nasabah dalam rangka memberikan kemudahan untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah.
- Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
- BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (*system availability*), keandalan sistem (*system reliability*) dan sistem keamanan (*security*). Penerapan sistem deteksi penipuan (*fraud detection system*) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
- Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
- Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan. Survei merupakan salah satu sarana bagi BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja
- BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

4. Penyaluran pembiayaan berbasis lingkungan

- Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
- Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari pembiayaan yang disalurkan.
- Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau

5. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank

Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/ limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak;

6. Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan

- Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
- Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
- Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.